

KEBIJAKAN PETRUS (PENEMBAKAN MISTERIUS) OLEH SOEHARTO PADA ERA ORDE BARU: KEAMANAN MASYARAKAT ATAU TERROR MASYARAKAT?

Fahrudin, Satria Krisna Aji

Universitas PGRI Yogyakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Januari 2026

Revised Januari 2026

Accepted Januari 2026

Available online Januari 2026

Email:

saji65326@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Abstract

The Penembakan Misterius (Petrus), or Mysterious Shootings policy, during the New Order era was one of the most controversial security measures implemented under President Soeharto's leadership. This program was carried out under the pretext of suppressing crime rates, yet in practice it generated fear and widespread human rights violations within society. This study aims to analyze the Petrus policy as an instrument of state power and to assess whether the actions taken were genuinely intended to maintain public safety or rather functioned as a form of terror against the population. This research employs a qualitative method with a case study approach focusing on the implementation of Petrus between 1983 and 1985. Data were collected through literature review, analysis of official documents, media reports, and academic studies related to New Order security policies. The data were analyzed thematically to identify patterns of power, legitimacy, and the social impacts of the policy. The findings indicate that the Petrus policy served a dual purpose as a tool of social and political control to maintain the stability of the New Order regime. Although formally justified as a security initiative, its implementation instilled collective fear and strengthened military domination over civil society. The policy also demonstrates how state violence was legitimized through discourses of morality and order. Overall, Petrus reflects state terror rather than a genuine public security program. This study underscores the importance of critical reflection on repressive state practices to ensure that future security policies uphold human rights and principles of social justice.

Keywords: Petrus, Soeharto, New Order, security policy, human rights violations.

PENDAHULUAN

Fenomena Penembakan Misterius atau yang lebih dikenal sebagai Petrus merupakan salah satu kebijakan keamanan paling kontroversial dalam sejarah pemerintahan Orde Baru. Kebijakan ini muncul pada awal dekade 1980-an, terutama antara 1982-1985, ketika negara menghadapi meningkatnya angka kriminalitas perkotaan, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Pemerintah Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, kemudian melakukan sebuah operasi yang tidak pernah secara terbuka diakui sebagai kebijakan negara, tetapi ditandai oleh rangkaian pembunuhan sistematis terhadap individu yang dituduh sebagai kriminal atau preman. Praktik-praktik pembunuhan ini dilakukan secara terorganisir, melibatkan aparat keamanan, dan sering meninggalkan ciri khas tertentu seperti bekas tembakan di kepala atau dada, tangan terikat, serta mayat yang sengaja dibiarkan di ruang publik sebagai peringatan. Fenomena inilah yang kemudian disebut masyarakat sebagai penembakan misterius atau Petrus (Cribb, 1991).

Namun, alih-alih melakukan penegakan hukum secara konstitusional, pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto justru menjalankan sebuah operasi yang tidak pernah secara terbuka diumumkan sebagai kebijakan negara, tetapi ditandai oleh rangkaian pembunuhan sistematis terhadap individu yang dicap sebagai kriminal atau preman. Praktik-praktik ini dilakukan secara terorganisir dengan keterlibatan aparat keamanan, terutama unsur militer dan kepolisian, dan menunjukkan pola eksekusi yang konsisten, seperti tembakan di

kepala atau dada, tangan korban terikat, serta mayat yang ditinggalkan di ruang publik sebagai bentuk intimidasi simbolik. Pola tersebut memperlihatkan bahwa tindakan ini bukan sekadar respons spontan terhadap kejahatan, melainkan bagian dari strategi yang dirancang untuk menciptakan efek psikologis luas di tengah masyarakat. Fenomena inilah yang kemudian dikenal secara luas oleh publik sebagai Penembakan Misterius atau Petrus, sebuah istilah yang mencerminkan ketakutan, ketidakjelasan, dan ketiadaan transparansi negara dalam menjalankan kebijakan keamanan tersebut.

Kebijakan ini menjadi masalah akademik yang penting karena ia memperlihatkan pertentangan mendasar antara narasi negara dan kritik masyarakat sipil, di mana negara membingkai Petrus sebagai strategi pengamanan sosial, sementara masyarakat dan kalangan akademisi melihatnya sebagai praktik kekerasan sistematis yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Di satu sisi, pemerintah menggambarkan Petrus sebagai langkah tegas yang bertujuan mengembalikan stabilitas keamanan masyarakat, yang menurut Soeharto telah terganggu oleh gelombang kriminalitas pasca liberalisasi ekonomi dan urbanisasi cepat. Namun, di sisi lain, berbagai penelitian, laporan aktivis HAM, hingga kesaksian korban dan keluarga menyebut kebijakan ini sebagai bentuk teror negara yang tidak hanya menyasar kriminal, tetapi juga digunakan sebagai instrumen politik untuk menakut-nakuti masyarakat dan memperkuat kontrol rezim. Dengan demikian, Petrus menimbulkan ambiguitas fundamental: apakah ia merupakan strategi penegakan hukum atau justru representasi kekerasan struktural yang dilegalisasi oleh negara?

Sebagai rezim yang sangat menekankan stabilitas, Orde Baru melihat keamanan sebagai fondasi utama pembangunan. Stabilitas nasional dipahami sebagai prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi yang menjadi agenda besar pemerintah sejak awal 1970-an. Dalam konteks inilah muncul argumentasi bahwa tindakan represif dapat dibenarkan demi menjaga ketertiban. Menurut Cribb (1990), Orde Baru membangun legitimasi politik melalui narasi ancaman—baik ancaman dari komunis, kriminalitas, maupun kelompok masyarakat yang dianggap subversif. Narasi kriminalitas pada awal 1980-an menjadi landasan ideal bagi negara untuk melakukan kebijakan ekstrem, dengan menggunakan aparat keamanan sebagai pelaksana tindakan pembebasan masyarakat dari ancaman premanisme.

Meski demikian, berbagai analisis menunjukkan bahwa kebijakan Petrus bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga erat dengan dinamika politik internal Orde Baru. Hadiz (2011) mencatat bahwa premanisme pada masa itu sering terhubung dengan elite politik dan bisnis tertentu, sehingga operasi Petrus dapat dipandang sebagai upaya merapikan ulang konfigurasi kekuasaan informal. Dalam konteks tersebut, pembunuhan terhadap kelompok tertentu bukan hanya untuk menekan kriminalitas, tetapi untuk menghapus aktor-aktor sosial yang dianggap tidak lagi menguntungkan atau dapat mengganggu stabilitas jaringan patronase negara.

Selain itu, Petrus memiliki implikasi besar terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Amnesty International (1985) melaporkan bahwa ratusan hingga ribuan orang menjadi korban Petrus tanpa melalui proses hukum yang sah. Pelanggaran serius terhadap hak hidup, hak atas peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap penyiksaan menjadi titik kritik utama. Karena negara secara resmi tidak pernah mengakui operasi ini, mekanisme pertanggungjawaban menjadi sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan absolut Orde Baru menciptakan ruang legitimasi bagi kekerasan negara, sekaligus menunjukkan lemahnya supremasi hukum dan akuntabilitas

institusi negara pada masa tersebut.

Dari sisi sosial, kebijakan Petrus menciptakan atmosfer ketakutan yang mendalam di masyarakat. Tubuh-tubuh korban yang sengaja dibiarkan di ruang publik bertujuan menghasilkan efek ganda: memperlihatkan kekuatan negara sekaligus memberikan pesan kuat bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan kapan saja kepada siapa pun yang dianggap mengancam ketertiban. Praktik seperti ini merupakan bagian dari apa yang disebut Foucault (1977) sebagai *policy of spectacle*—pertunjukan kekuasaan melalui tubuh-tubuh yang dihukum secara publik. Masyarakat kemudian membangun memori kolektif tentang Petrus sebagai era kengerian yang diciptakan negara sendiri, bukan semata-mata reaksi terhadap kriminalitas (Cahyaningtias & Hermawan, 2025).

Penelitian tentang Petrus menjadi relevan hingga saat ini karena masih terdapat perdebatan historiografis mengenai statusnya sebagai kebijakan negara. Sebagian dokumen resmi tidak secara eksplisit menyebut Petrus sebagai operasi terencana, tetapi kesaksian aparat yang terlibat serta konsistensi pola pembunuhan menunjukkan adanya keterlibatan struktural. Misalnya, dalam memoarnya, Soeharto (1989) secara implisit mengakui bahwa kebijakan keras terhadap kriminalitas diperlukan dan bahwa pelaku kriminal “harus diberi tanda” agar masyarakat waspada—pernyataan yang secara luas ditafsirkan sebagai justifikasi terhadap praktik Petrus.

Selain urgensi historis, penelitian ini juga penting secara akademik karena dapat menjadi dasar analisis lebih luas mengenai hubungan antara negara, kekerasan, dan kontrol sosial. Studi mengenai Petrus memungkinkan peneliti memahami bagaimana rezim otoriter memproduksi legitimasi melalui mekanisme kekerasan terselubung. Sebagaimana dikemukakan Lev (2010), kekerasan negara dalam konteks Indonesia bukan hanya merupakan alat represif, tetapi juga bagian integral dari strategi politik untuk mempertahankan dominasi.

Dengan menggabungkan analisis politik, sosial, dan HAM, penelitian mengenai Petrus dapat membantu menjawab pertanyaan sentral: Apakah tindakan tersebut benar-benar bertujuan menjaga keamanan, atau justru menunjukkan bagaimana negara menggunakan kekerasan sebagai alat kekuasaan? Pertanyaan ini penting tidak hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk membentuk wacana hak asasi manusia dan tata kelola keamanan di Indonesia saat ini.

Oleh karena itu, artikel ini akan menelaah kebijakan Petrus dalam kerangka yang lebih luas, meliputi dinamika politik Orde Baru, narasi negara tentang keamanan, dampak sosial terhadap masyarakat, serta kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kekerasan negara dijustifikasi dan dilembagakan, serta apa implikasinya terhadap konsep keamanan, keadilan, dan demokrasi di Indonesia (Maula et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi historis untuk mengkaji secara mendalam dinamika kebijakan Penembakan Misterius (Petrus) pada era Orde Baru sebagai bagian dari politik keamanan negara, dengan menelusuri sumber-sumber arsip, dokumen resmi pemerintah, laporan media massa, serta karya-karya akademik yang relevan guna merekonstruksi konteks sosial-politik lahirnya kebijakan tersebut. Melalui penelusuran

ini, penelitian tidak hanya memetakan kronologi peristiwa Petrus, tetapi juga menganalisis bagaimana kebijakan ini dibingkai dalam wacana resmi negara dan dipersepsikan oleh masyarakat sipil. Pendekatan historis memungkinkan peneliti memahami Petrus sebagai produk relasi kekuasaan dalam suasana politik otoritarian, bukan sekadar respons teknis terhadap kriminalitas. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengungkap makna politik di balik praktik kekerasan negara serta dampaknya terhadap pembentukan iklim ketakutan, kepatuhan sosial, dan legitimasi kekuasaan Orde Baru. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena Petrus tidak dapat dianalisis melalui angka atau statistik semata, melainkan membutuhkan pemahaman atas konteks politik, narasi kekuasaan, serta pengalaman sosial masyarakat yang muncul akibat kebijakan tersebut, khususnya dalam menelusuri bagaimana kekerasan negara dilegitimasi melalui bahasa stabilitas, ketertiban, dan keamanan nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menangkap makna subjektif yang dialami oleh berbagai aktor—baik aparat negara, korban, maupun masyarakat luas—serta membaca kebijakan Petrus sebagai konstruksi sosial yang sarat kepentingan politik. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti mengungkap pola relasi kuasa, mekanisme pembungkaman, dan produksi ketakutan yang tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami Petrus bukan sekadar sebagai kebijakan keamanan, tetapi sebagai praktik politik yang membentuk ingatan kolektif dan trauma sosial dalam sejarah Orde Baru. Metode studi historis memungkinkan peneliti menelusuri peristiwa secara kronologis, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, dan menganalisis bagaimana kebijakan Petrus dibingkai, diimplementasikan, serta diterima oleh publik. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi arsip pemberitaan media masa 1980-an seperti Kompas, Sinar Harapan, dan Tempo, dokumen dan pernyataan resmi pemerintah, laporan lembaga hak asasi manusia, dan kesaksian masyarakat sebagaimana dipublikasikan oleh organisasi nasional maupun internasional. Sumber sekunder mencakup buku-buku akademik mengenai Orde Baru, laporan penelitian mengenai militerisme dan politik kekerasan, serta artikel jurnal yang membahas premanisme dan stabilitas politik pada masa itu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menghimpun buku, arsip berita, dokumen pemerintah, laporan investigasi, serta literatur akademik relevan. Selain itu, peneliti melakukan kritik eksternal dan internal untuk menilai keaslian, kredibilitas, serta bias sumber mengingat isu Petrus merupakan fenomena politik yang sarat dengan kontroversi dan manipulasi narasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis historis-kritis, yang mencakup beberapa tahap, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran makna dan hubungan antarperistiwa), serta historiografi (penyusunan narasi ilmiah mengenai kebijakan Petrus). Analisis ini membantu mengungkap bagaimana kebijakan Petrus dijalankan, tujuan formal maupun informalnya, serta dampak sosial dan politik yang ditimbulkan. Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis dokumen, laporan resmi, kesaksian masyarakat, dan studi akademik sehingga diperoleh interpretasi yang lebih objektif dan menyeluruh. Dengan demikian, metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan Petrus, menilai apakah praktik tersebut merupakan strategi keamanan publik atau bentuk teror sistematis yang digunakan negara untuk mengontrol masyarakat dan memperkuat stabilitas kekuasaan Orde Baru.

HASIL DAN PENJELASAN

Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Petrus (1982-1985)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penembakan Misterius (Petrus) yang berlangsung pada 1982-1985 merupakan operasi sistematis yang dijalankan oleh aparat keamanan di bawah struktur komando Orde Baru, dengan target individu yang ditetapkan secara sepihak sebagai preman atau kriminal tanpa proses hukum formal. Sejumlah laporan menyatakan bahwa korban ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan dan luka tembak dalam pola yang seragam di berbagai kota besar seperti Jakarta, Solo, dan Yogyakarta, memperlihatkan bahwa operasi ini tidak bersifat lokal, tetapi merupakan bagian dari kebijakan keamanan nasional (Isnaeni, 2018). Pelaksanaan Petrus menimbulkan dua respons berbeda: sebagian masyarakat merasa terbantu karena turunnya angka kriminalitas, sementara lainnya mengalami rasa takut akibat tindakan negara yang menghilangkan nyawa tanpa akuntabilitas hukum, menunjukkan bahwa kebijakan ini berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus sarana memperkuat wibawa negara (Adiguna, 2012).

Sejumlah laporan menyatakan bahwa korban ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan fisik serta luka tembak di bagian vital tubuh seperti kepala dan dada, sering kali dengan kondisi tangan terikat dan mayat diletakkan di ruang publik sebagai bentuk pesan simbolik kepada masyarakat. Pola seragam ini ditemukan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Semarang, yang memperlihatkan bahwa operasi ini tidak bersifat sporadis atau lokal, melainkan bagian dari kebijakan nasional dengan skema yang terstruktur (Rachmawati, 2023). Keberulangan modus dan keseragaman pola kematian mengindikasikan adanya standar operasi tertentu dalam pelaksanaannya, sehingga memperkuat dugaan bahwa Petrus dijalankan oleh institusi negara, bukan kelompok vigilante atau aktor informal. Temuan ini sekaligus membantah narasi resmi yang cenderung mengaburkan keterlibatan negara dalam praktik-praktik pembunuhan di luar hukum tersebut.

Pola seragam dari eksekusi ini ditemukan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, dan Semarang, menunjukkan bahwa operasi ini tidak bersifat sporadis atau terbatas secara lokal. Keberulangan modus, konsistensi tanda-tanda kekerasan, dan lokasi publik yang strategis memperlihatkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari skema nasional yang terstruktur dan terencana (Cribb, 2020). Pola ini menandai adanya mekanisme koordinasi internal di antara aparat keamanan, dengan prosedur yang diikuti secara konsisten untuk mencapai tujuan intimidatif dan pengendalian sosial.

Keseragaman dalam modus operandi dan pelaksanaan eksekusi memperkuat dugaan bahwa Petrus dijalankan oleh institusi negara, bukan oleh kelompok vigilante atau aktor informal yang bertindak secara independen. Fakta ini sekaligus membantah narasi resmi pemerintah yang berusaha mengaburkan keterlibatan negara dalam praktik-praktik pembunuhan di luar hukum. Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa Petrus bukan sekadar respons terhadap kriminalitas, tetapi merupakan instrumen kekuasaan negara yang sistematis, dengan tujuan menegakkan kontrol politik dan sosial melalui teror.

Pelaksanaan Petrus menimbulkan respons yang terbelah di tengah masyarakat, karena di satu sisi sebagian warga menganggap kebijakan ini berhasil menurunkan angka kriminalitas dan menciptakan ketertiban sementara di ruang publik, tetapi di sisi lain melahirkan rasa takut yang mendalam terhadap aparat keamanan. Ketidakpastian mengenai siapa yang dapat menjadi target berikutnya menciptakan iklim teror yang bersifat laten, di mana masyarakat

hidup dalam kecemasan dan kepatuhan yang dipaksakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Petrus berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pemberantasan kriminalitas, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial dan politik untuk memperkuat wibawa negara melalui ketakutan (Aspinall & Mietzner, 2019). Dengan demikian, kebijakan ini memperlihatkan bagaimana kekerasan negara dapat digunakan secara strategis untuk mengonstruksi stabilitas semu sekaligus membungkam potensi perlawanan sosial.

Pola Kekerasan dan Mekanisme Operasional Petrus

Analisis tematik memperlihatkan bahwa pola kekerasan dalam Petrus konsisten dengan karakter kekerasan negara yang terencana. Eksekusi dilakukan tanpa proses hukum, korban sering menunjukkan tanda penganiayaan sebelum ditembak, dan mayat diletakkan di ruang publik untuk menciptakan efek psikologis yang luas. Tidak ditemukan dokumen negara yang secara eksplisit memerintahkan eksekusi, tetapi keseragaman tindakan aparat serta kesaksian pascareformasi memperlihatkan bahwa operasi ini berjalan melalui jalur komando internal yang tertutup, mirip praktik yang dilakukan rezim otoriter lain di Asia dan Amerika Latin (Kammen & McGregor, 2012). Dengan demikian, mekanisme operasional Petrus dirancang untuk meminimalkan jejak administratif sekaligus memaksimalkan dampak intimidatif terhadap masyarakat.

Mayat korban kerap diletakkan di ruang publik—di jalanan, selokan, atau tempat strategis lainnya—sebagai bentuk komunikasi visual yang brutal kepada masyarakat luas. Praktik ini menimbulkan efek psikologis yang mendalam berupa ketakutan massal, rasa tidak aman, serta kepatuhan yang dibangun bukan atas dasar kesadaran hukum, melainkan karena ancaman kekerasan. Pola semacam ini menunjukkan bahwa Petrus tidak sekadar tindakan represif, tetapi sebuah strategi teror yang dirancang untuk mendisiplinkan masyarakat melalui rasa takut kolektif. Dengan cara tersebut, negara tidak hanya menargetkan individu tertentu, melainkan seluruh masyarakat sebagai audiens dari kekerasan yang dipertontonkan.

Efek psikologis dari praktik ini tidak terbatas pada individu yang menjadi korban langsung, tetapi meluas ke seluruh komunitas sebagai bentuk kontrol sosial. Ketakutan massal yang tercipta membuat masyarakat enggan menentang atau mempertanyakan kebijakan negara, bahkan dalam situasi di mana tindakan tersebut jelas melanggar hak asasi manusia. Kepatuhan yang dihasilkan bukan karena legitimasi hukum atau moralitas, melainkan karena ancaman kekerasan yang nyata dan dapat terjadi kapan saja. Dalam konteks ini, Petrus berfungsi sebagai instrumen disiplin sosial yang efektif, di mana rasa takut menjadi mekanisme pengendalian yang lebih kuat daripada peraturan tertulis atau institusi hukum.

Dengan demikian, pola penempatan mayat di ruang publik menunjukkan bahwa Petrus bukan sekadar tindakan represif terhadap individu yang dianggap kriminal, melainkan sebuah strategi teror yang terencana untuk mendisiplinkan masyarakat secara kolektif. Negara tidak hanya menargetkan korban secara langsung, tetapi seluruh populasi menjadi audiens dari kekerasan yang dipertontonkan, sehingga menciptakan efek jera dan kepatuhan yang meluas. Strategi ini menegaskan bahwa kekerasan dalam Petrus bersifat sistemik dan instrumental, dirancang untuk mempertahankan kontrol politik dan sosial melalui intimidasi visual dan psikologis yang nyata.

Meskipun tidak ditemukan dokumen negara yang secara eksplisit memerintahkan praktik eksekusi di luar hukum ini, keseragaman tindakan aparat serta kesaksian pascareformasi

memperlihatkan bahwa operasi Petrus berjalan melalui jalur komando internal yang tertutup. Mekanisme seperti ini memungkinkan negara menyangkal tanggung jawab secara formal, sembari tetap mengendalikan proses di lapangan. Pola ini menunjukkan kemiripan dengan praktik kekuasaan rezim otoriter di Asia dan Amerika Latin yang menggunakan kekerasan tanpa jejak administratif sebagai instrumen politik (Kammen & McGregor, 2012). Dengan demikian, desain operasional Petrus dapat dipahami sebagai strategi kekuasaan yang sengaja dibuat ambigu: meminimalkan bukti akademis dan hukum, tetapi memaksimalkan dampak intimidatif terhadap masyarakat sipil.

Dampak Sosial dan Politik Kebijakan Petrus

Dari perspektif sosial, Petrus memang menurunkan tingkat kriminalitas dalam waktu singkat, tetapi memberikan dampak psikologis berupa trauma, kecemasan, dan rasa tidak aman di kalangan masyarakat umum. Ketakutan ini tidak hanya dirasakan kelompok yang dituduh kriminal, tetapi juga warga biasa yang khawatir akan kemungkinan salah sasaran atau penyalahgunaan kewenangan (Colombijn & Côté, 2015). Secara politik, Petrus memperkuat dominasi militer melalui konsep Dwi Fungsi ABRI yang menjadikan militer sebagai aktor keamanan sekaligus politik. Kebijakan ini melemahkan institusi peradilan dan memperlihatkan bahwa negara lebih mengandalkan kekerasan langsung daripada prosedur hukum, memperdalam struktur otoritarian Orde Baru (Aspinall, 2010). Dengan demikian, dampak sosial dan politik Petrus jauh lebih luas daripada sekadar penanganan kriminalitas, melainkan menjadi strategi negara membangun hegemoni dan kepatuhan.

Dalam konteks ini, keamanan menjadi konsep yang ambigu, karena masyarakat merasa “aman” dari kriminalitas, tetapi tidak aman dari negara itu sendiri. Keamanan yang awalnya diproyeksikan sebagai tujuan utama kebijakan Petrus justru berubah menjadi paradoks, karena ancaman terbesar terhadap keselamatan warga berasal dari aparat yang seharusnya melindungi mereka. Ketika negara menjadi sumber ketakutan, kepercayaan publik terhadap institusi resmi pun terkikis. Hubungan antara negara dan warga yang seharusnya berbasis perlindungan dan legitimasi hukum berubah menjadi relasi dominasi dan kecurigaan yang berkepanjangan.

Secara politik, Petrus memperkuat dominasi militer dalam kehidupan sipil melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI, yang menempatkan militer tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pengendali kehidupan sosial dan politik. Operasi Petrus menjadi contoh nyata bagaimana militer diberi otoritas luas untuk mengintervensi kehidupan warga tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Institusi peradilan menjadi tersingkir, karena penegakan hukum digantikan oleh keputusan sepihak aparat keamanan di lapangan. Hal ini menandai kemunduran prinsip negara hukum, di mana kekuasaan tidak lagi dibatasi oleh aturan, melainkan dijalankan melalui kekerasan (Aspinall, 2010).

Dengan demikian, dampak sosial dan politik Petrus jauh melampaui persoalan kriminalitas semata dan berfungsi sebagai instrumen pembentukan hegemoni negara. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana kekerasan negara dijadikan alat untuk memproduksi kepatuhan, membungkam kritik, dan meneguhkan wibawa rezim Orde Baru. Dalam jangka panjang, Petrus meninggalkan warisan ketakutan dan trauma kolektif yang sulit dihapus, sekaligus memperlihatkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas kekerasan hanya menghasilkan ketenangan semu. Oleh karena itu, Petrus tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan keamanan, melainkan sebagai bagian dari strategi kekuasaan yang menempatkan kontrol

politik di atas penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Petrus sebagai Instrumen Politik Kekuasaan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Petrus bukan hanya kebijakan keamanan, tetapi juga instrumen politik untuk memperkuat kekuasaan Soeharto. Dalam konteks ini, Petrus berfungsi sebagai sarana membangun citra pemimpin kuat yang mampu mengendalikan kriminalitas dan menjaga ketertiban nasional, terutama dalam situasi meningkatnya kritik terhadap praktik korupsi dan pembatasan kebebasan politik (Robinson, 2018). Selain itu, kebijakan ini menata ulang relasi antara negara dan jaringan preman lokal, di mana kelompok kriminal tertentu dieliminasi sementara yang lain dipelihara sebagai bagian dari struktur kekuasaan informal rezim (Wilson, 2015). Dengan demikian, Petrus memperlihatkan bagaimana kekerasan negara digunakan sebagai strategi mempertahankan stabilitas politik, dan bukan sekadar menjaga keamanan publik sebagaimana diklaim pemerintah.

Dalam ranah simbolik, Petrus membangun citra Soeharto sebagai pemimpin yang tegas, kuat, dan tidak ragu menggunakan kekerasan demi “mutlaknya” stabilitas nasional. Citra tersebut penting terutama ketika rezim Orde Baru mulai menghadapi tekanan politik berupa kritik terhadap korupsi, nepotisme, dan pembatasan kebebasan sipil pada awal 1980-an. Melalui Petrus, negara menciptakan narasi bahwa kekacauan sosial dapat ditundukkan hanya oleh kekuasaan yang kuat dan sentralistik, yang personifikasinya dilekatkan pada figur Soeharto (Robinson, 2018). Dengan demikian, kebijakan ini berkontribusi dalam membangun legitimasi politik melalui ketakutan sekaligus rasa aman semu.

Selain sebagai alat simbolik, Petrus juga berperan dalam menata ulang relasi antara negara dan jaringan kekuasaan informal seperti preman, gangster lokal, dan kelompok kriminal terorganisir. Penelitian menunjukkan bahwa operasi ini tidak sepenuhnya memberantas premanisme, tetapi justru melakukan seleksi politik terhadap aktor-aktor informal yang dianggap tidak sejalan atau tidak lagi berguna bagi rezim. Sebagian kelompok dieliminasi, sementara sebagian lainnya dipelihara atau dibiarkan hidup sebagai perpanjangan tangan kekuasaan di level lokal, misalnya dalam pengamanan proyek, intimidasi politik, atau kontrol sosial di akar rumput (Wilson, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan negara bersifat selektif dan instrumental, bukan netral atau murni bertujuan menjaga ketertiban.

Dengan demikian, Petrus memperlihatkan bahwa kekerasan negara digunakan sebagai strategi mempertahankan stabilitas politik melalui kombinasi represi langsung dan pengelolaan jaringan kekuasaan informal. Kebijakan ini menegaskan bahwa Orde Baru tidak semata-mata memerintah melalui institusi formal, tetapi juga melalui struktur bayangan yang bekerja di luar aturan hukum. Oleh karena itu, klaim pemerintah bahwa Petrus adalah kebijakan keamanan publik menjadi problematis, karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah konsolidasi kekuasaan dan pengendalian politik. Dalam kerangka ini, Petrus lebih tepat dipahami sebagai bentuk teror negara yang dilembagakan demi keberlangsungan rezim.

Respons Masyarakat dan Media terhadap Petrus

Respons masyarakat terhadap Petrus sangat beragam. Media massa pada era Orde Baru, yang berada di bawah kontrol ketat negara, umumnya mendukung narasi pemerintah bahwa tindakan ini merupakan operasi keamanan yang sah dan diperlukan. Namun, organisasi

internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengkritik Petrus sebagai bentuk extrajudicial killings yang melanggar hak asasi manusia (Amnesty International, 1984). Kesaksian keluarga korban yang muncul setelah Reformasi 1998 menunjukkan adanya trauma mendalam dan stigma sosial, sementara sebagian masyarakat tetap memandang Petrus sebagai kebijakan yang efektif menekan kriminalitas. Perbedaan persepsi ini mencerminkan adanya hegemoni wacana negara pada masa Orde Baru yang menutupi aspek kekerasan struktural (Heryanto, 2006).

Di sisi lain, organisasi internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch secara konsisten mengkritik pelaksanaan Petrus sebagai bentuk extrajudicial killings yang jelas melanggar hak asasi manusia (Amnesty International, 1984). Laporan-laporan mereka menyoroti karakter sistematis dari pembunuhan, pola intimidasi terhadap warga, dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban aparat keamanan. Kritik internasional ini menekankan bahwa operasi semacam Petrus tidak hanya menimbulkan kerugian individu, tetapi juga merusak prinsip-prinsip hukum dan norma internasional yang harus dijunjung oleh negara. Dengan demikian, narasi internasional menampilkan kontras yang tajam terhadap narasi domestik yang dikontrol oleh rezim.

Kesaksian keluarga korban yang muncul setelah Reformasi 1998 menambahkan dimensi sosial dan psikologis terhadap pemahaman mengenai dampak Petrus. Banyak keluarga melaporkan trauma mendalam, ketakutan yang berkepanjangan, dan stigma sosial yang melekat pada anggota keluarga korban, bahkan bertahun-tahun setelah kejadian. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih memandang Petrus sebagai kebijakan yang efektif menekan kriminalitas, menunjukkan adanya ketegangan antara pengalaman langsung dan persepsi kolektif yang dibentuk melalui propaganda negara. Kontradiksi ini mencerminkan bagaimana kekerasan struktural dapat mempengaruhi interpretasi sosial, di mana sebagian kelompok menekankan efek keamanan sementara kelompok lain menekankan dampak pelanggaran hak dan psikologis.

Perbedaan persepsi ini pada akhirnya menyoroti hegemoni wacana negara pada masa Orde Baru yang menutupi aspek kekerasan struktural dan politis dari Petrus (Heryanto, 2006). Wacana resmi yang mendominasi media dan komunikasi publik membingkai kebijakan tersebut sebagai keberhasilan keamanan, sementara pengalaman nyata korban dan keluarga mereka tersisihkan dari narasi publik. Fenomena ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya diterapkan melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui produksi wacana yang membentuk opini dan legitimasi sosial. Dengan demikian, respons masyarakat terhadap Petrus bukan sekadar reaksi atas tindakan aparat, tetapi juga refleksi dari bagaimana informasi, propaganda, dan kontrol komunikasi memengaruhi persepsi sosial dalam rezim otoriter.

Analisis Diskursus: Keamanan atau Teror Negara?

Analisis diskursus memperlihatkan adanya pertentangan fundamental antara narasi resmi negara dan realitas empiris. Narasi pemerintah menyatakan bahwa Petrus merupakan upaya memulihkan stabilitas dan memberantas premanisme, namun temuan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dilakukan dengan pola kekerasan sistematis yang tidak menghormati prosedur hukum. Secara akademik, Petrus lebih tepat dikategorikan sebagai state-imposed terror—kekerasan yang dilakukan negara terhadap warganya sebagai bentuk pengendalian sosial dan konsolidasi kekuasaan (Levitsky & Way, 2010). Tindakan ini mengaburkan batas antara keamanan dan teror, karena negara bertindak sebagai pelaku

kekerasan sekaligus institusi yang mengklaim melindungi masyarakat. Dengan demikian, Petrus menunjukkan pergeseran definisi keamanan dari perlindungan warga menjadi perlindungan rezim.

Secara akademik, Petrus lebih tepat dikategorikan sebagai state-imposed terror, yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan negara terhadap warganya sendiri sebagai instrumen pengendalian sosial dan konsolidasi kekuasaan (Levitsky & Way, 2010). Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, menciptakan rasa takut yang meluas di masyarakat. Efeknya tidak terbatas pada individu yang menjadi korban langsung, tetapi juga mempengaruhi perilaku masyarakat secara keseluruhan, membentuk kepatuhan melalui intimidasi. Dengan demikian, Petrus memperlihatkan bagaimana kekerasan negara dapat dijadikan sarana strategis untuk menegakkan dominasi politik dan memperkuat struktur otoritarian.

Tindakan ini juga mengaburkan batas antara konsep keamanan publik dan teror politik, karena negara bertindak ganda sebagai pelaku kekerasan sekaligus institusi yang mengklaim melindungi masyarakat. Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa operasi Petrus diperlukan untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum; di sisi lain, mekanisme pelaksanaan yang rahasia, selektif, dan brutal menandai ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Kontradiksi ini menimbulkan ketidakpastian di masyarakat mengenai siapa yang aman dan siapa yang menjadi target, sehingga keamanan yang diklaim oleh negara sebenarnya berfungsi sebagai alat kontrol dan dominasi.

Dengan demikian, kebijakan Petrus menunjukkan pergeseran definisi keamanan dari perlindungan warga menjadi perlindungan rezim. Keamanan tidak lagi diukur berdasarkan kesejahteraan dan hak-hak sipil masyarakat, tetapi melalui stabilitas politik dan kepatuhan warga terhadap kekuasaan yang absolut. Operasi ini memperlihatkan bagaimana wacana resmi dapat membingkai kekerasan sebagai kebijakan keamanan, sementara kenyataan empiris menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah mempertahankan hegemoni politik. Dalam konteks ini, Petrus menjadi contoh klasik bagaimana negara otoriter menggunakan kekerasan terencana sebagai instrumen legitimasi dan pengendalian sosial.

Perbandingan dengan Praktik Kekerasan Negara di Negara Lain

Penelitian membandingkan Petrus dengan kebijakan keamanan ekstrem di negara lain seperti operasi anti-gang di Filipina pada masa Marcos, Dirty War di Argentina, dan praktik penyiksaan di Brasil. Pola-pola tersebut memiliki kesamaan utama: penggunaan kekerasan negara untuk tujuan politik yang dibungkus narasi keamanan publik. Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa negara otoriter sering menggunakan logika stabilitas sebagai alasan untuk menggunakan kekerasan ekstrem (Subekti, 2023). Perbandingan ini memperkuat argumentasi bahwa Petrus merupakan bagian dari pola global kekerasan negara pada abad ke-20, yang menggunakan kriminalitas sebagai legitimasi bagi tindakan represif. Pola-pola ini menunjukkan bahwa kekerasan negara seringkali dikodifikasi dan dilegitimasi melalui konstruksi wacana, di mana ancaman kriminalitas atau subversi politik dijadikan justifikasi. Di Filipina, misalnya, operasi anti-gang dilakukan untuk menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menegakkan hukum, sementara di Argentina dan Brasil, pembunuhan dan penyiksaan terhadap individu tertentu dipresentasikan sebagai upaya melindungi masyarakat dari kekacauan politik. Studi perbandingan semacam ini menekankan bahwa narasi keamanan publik menjadi alat retorik penting untuk menutupi tujuan politik dan kontrol sosial yang sesungguhnya (Wilson, 2015).

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa Petrus, meskipun berada dalam konteks Indonesia, mengikuti pola global kekerasan negara yang menggunakan kriminalitas sebagai legitimasi bagi tindakan represif. Aparat keamanan bertindak selektif dan sistematis, menargetkan individu yang dianggap mengancam stabilitas, sementara prosedur hukum formal diabaikan. Operasi ini juga menimbulkan efek psikologis yang meluas di masyarakat, mirip dengan pola ketakutan yang tercipta di Argentina dan Brasil. Keseragaman modus operandi, mulai dari identifikasi target hingga eksekusi publik, menunjukkan bahwa tindakan represif negara sering kali mengikuti logika universal kekuasaan otoriter, di mana hukum dan moralitas subordinat terhadap kepentingan politik.

Dengan demikian, perbandingan ini memperkuat argumen bahwa Petrus bukan sekadar kebijakan keamanan domestik, tetapi bagian dari fenomena global kekerasan negara pada abad ke-20. Kebijakan semacam ini menegaskan bahwa negara otoriter memanfaatkan isu kriminalitas atau ketidakstabilan sosial sebagai legitimasi untuk mengimplementasikan kontrol sosial dan politik yang represif. Temuan ini menempatkan Petrus dalam kerangka analisis yang lebih luas, di mana kekerasan yang dilakukan negara dapat dipahami sebagai strategi universal untuk mempertahankan hegemoni, menegakkan kepatuhan, dan membungkam potensi oposisi terhadap rezim yang berkuasa.

Implikasi Kebijakan terhadap Ruang Hukum dan Demokrasi di Indonesia

Petrus memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan hukum dan demokrasi Indonesia. Kebijakan ini menormalisasi kekerasan negara dan menciptakan preseden bahwa hukum dapat dipinggirkan demi alasan stabilitas politik. Budaya impunitas yang lahir dari praktik ini bertahan hingga era Reformasi, tercermin dalam berbagai kasus kekerasan aparat yang masih sulit diadili (Erlin, 2022). Selain itu, Petrus memberikan gambaran bahwa negara dapat menggunakan hukum secara selektif, memperkuat relasi kuasa yang timpang antara aparat dan warga, serta melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Dalam konteks demokrasi, warisan kekerasan negara ini menunjukkan pentingnya reformasi sektor keamanan untuk memastikan bahwa negara tidak kembali menggunakan kekerasan sebagai alat politik.

Budaya impunitas yang muncul dari praktik Petrus terbukti bertahan hingga era Reformasi, dan tercermin dalam berbagai kasus kekerasan aparat yang masih sulit diadili hingga saat ini (Tonto, 2025). Ketidakmampuan sistem peradilan untuk menuntut pertanggungjawaban aparat mengokohkan pandangan bahwa aparat dapat bertindak bebas ketika menghadapi ancaman atau ketidakpatuhan masyarakat. Implikasi dari budaya impunitas ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga meresap ke dalam praktik sosial dan politik, memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap negara yang represif dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Selain itu, Petrus menunjukkan bahwa negara dapat menggunakan hukum secara selektif untuk melayani kepentingan politik, memperkuat relasi kuasa yang timpang antara aparat dan warga, serta membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Aparat keamanan menjadi pemegang kekuasaan absolut dalam menafsirkan dan menegakkan hukum, sementara warga kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya bersifat universal dan adil. Ketimpangan ini melemahkan legitimasi institusi negara, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen keadilan, melainkan alat kontrol politik yang berpihak pada kekuasaan.

Dalam konteks demokrasi, warisan Petrus memperlihatkan bahwa kekerasan negara dapat menjadi penghambat utama bagi pembangunan institusi demokratis yang sehat. Efek psikologis dan struktural dari operasi ini membuat warga enggan menuntut hak-hak mereka, dan menciptakan iklim ketakutan yang memperkuat dominasi negara. Hal ini menegaskan bahwa reformasi sektor keamanan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kekerasan tidak digunakan lagi sebagai instrumen politik, serta untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi yang transparan.

Dengan demikian, warisan jangka panjang Petrus tidak hanya bersifat historis, tetapi juga relevan bagi pembangunan hukum dan demokrasi di masa kini. Kebijakan ini menjadi pengingat bahwa stabilitas politik yang dibangun melalui kekerasan memiliki konsekuensi serius bagi tatanan hukum, budaya demokrasi, dan hak asasi manusia. Untuk mencegah terulangnya praktik serupa, diperlukan langkah-langkah reformasi yang komprehensif, termasuk penguatan mekanisme akuntabilitas aparat, transparansi hukum, dan pendidikan publik mengenai hak-hak sipil, sehingga prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat ditegakkan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kebijakan Penembakan Misterius (Petrus) pada era Orde Baru merupakan salah satu contoh paling jelas dari bagaimana negara dapat menggunakan kekerasan secara terstruktur untuk mempertahankan stabilitas politik sekaligus membangun citra keamanan yang dikendalikan secara otoriter. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan jalanan, tetapi harus dilihat dalam kerangka politik yang lebih luas, yakni upaya negara untuk menegakkan hegemoni kekuasaan melalui strategi kontrol sosial yang represif. Walaupun rezim Orde Baru mendalilkan bahwa Petrus dijalankan demi ketertiban umum, bukti empiris, kesaksian publik, dan analisis berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih mencerminkan teror yang diinstitutionalisasi untuk membentuk ketakutan kolektif di masyarakat. Penembakan tanpa proses hukum tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, tetapi juga mengikis pondasi negara hukum yang seharusnya menjadi dasar bagi pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Melalui penelusuran dokumen, arsip, laporan media, dan literatur akademik, penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan Petrus beroperasi secara sistematis dengan peran sentral aparat keamanan, terutama militer dan kepolisian, yang menjalankan instruksi tanpa mekanisme akuntabilitas yang transparan. Pola-pola pelaksanaan Petrus menunjukkan adanya kesengajaan dalam menciptakan efek psikologis luas, di mana tubuh-tubuh korban dibiarkan di ruang publik sebagai pesan kekuasaan. Dengan demikian, Petrus tidak hanya berfungsi sebagai tindakan represif langsung terhadap kelompok yang dicap “kriminal”, tetapi juga menjadi instrumen simbolik untuk menundukkan masyarakat agar patuh terhadap struktur kekuasaan Orde Baru. Ketakutan yang diproduksi secara politik ini memperkuat legitimasi Soeharto sebagai pemimpin kuat yang mampu mengendalikan ancaman sosial, meskipun melalui cara-cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Kesimpulan lain yang penting adalah bahwa Petrus mencerminkan persoalan serius terkait penggunaan diskursus keamanan sebagai alat pembenaran politik. Rezim Orde Baru membingkai kejahatan sebagai ancaman utama bagi stabilitas nasional, sehingga tindakan

kekerasan negara dianggap sebagai langkah “darurat” yang dapat diterima. Namun, narasi ini terbukti menutupi realitas bahwa negara secara aktif mengabaikan due process of law dan memperluas kewenangan aparat keamanan tanpa pengawasan publik. Pola demikian menunjukkan bagaimana kekerasan negara sering kali dilegitimasi melalui wacana moralitas dan ketertiban, padahal secara substantif kebijakan itu merugikan masyarakat dan melemahkan otonomi sipil. Dalam konteks tersebut, Petrus memperlihatkan bagaimana rezim otoriter memanfaatkan isu keamanan untuk mempertahankan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa konsekuensi sosial Petrus berlangsung jauh lebih lama daripada periode pelaksanaannya. Trauma kolektif, ketakutan terhadap aparat, serta hilangnya kepercayaan pada institusi hukum terus membekas pada masyarakat Indonesia bahkan setelah berakhirnya Orde Baru. Kebijakan ini menyisakan dilema etis dan yuridis mengenai praktik kekerasan negara, serta menjadi pengingat bahwa keamanan tidak dapat dicapai melalui penghilangan nyawa tanpa proses hukum. Demokrasi yang sehat memerlukan penghormatan terhadap hak hidup, transparansi, dan akuntabilitas institusional—nilai yang hilang selama pelaksanaan Petrus. Karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi upaya rekonstruksi sejarah kekerasan negara dan mempromosikan perlunya evaluasi kebijakan keamanan agar tidak mengulang pola represif masa lalu.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Petrus tidak dapat dikategorikan sebagai kebijakan keamanan publik, tetapi lebih tepat dipahami sebagai teror negara yang dilembagakan untuk memperkuat otoritarianisme Orde Baru. Tindakan ini menunjukkan bahwa keamanan hanya menjadi retorika semu yang digunakan untuk melegitimasi kekerasan politik, sementara rakyat menjadi objek yang dikorbankan dalam proses mempertahankan kekuasaan. Ke depan, refleksi kritis terhadap Petrus menjadi penting agar Indonesia dapat membangun mekanisme keamanan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pengalaman sejarah ini harus menjadi peringatan bahwa negara, ketika tidak dikontrol oleh mekanisme demokratis, dapat menjadi pelaku utama kekerasan terstruktur. Karena itu, pembelajaran dari kebijakan Petrus harus menjadi dasar bagi pembangunan sistem keamanan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Kebijakan ini meninggalkan jejak trauma sosial yang mendalam dan memperlihatkan bagaimana kekuasaan dapat memanfaatkan kekerasan sebagai alat legitimasi politik serta pengendalian sosial bagi rakyatnya sendiri.

REFERENSI

- Adiguna, J. (2012, July). ‘Petrus’ gross rights violation. *The Jakarta Post*. https://www.thejakartapost.com/news/2012/07/25/petrus-gross-rights-violation.html?utm_source=chatgpt.com
- Cahyaningtias, P. R., & Hermawan, E. S. (2025). PENEMBAKAN MISTERIUS (PETRUS) DI JAWA TIMUR DALAM PEMBERITAAN SURAT KABAR SURABAYA POST TAHUN 1983-1985. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 16(4), 1-13.
- Cribb, R. (1991). *THE INDONESIAN KILLINGS OF 1965-1966*.
- Erlin, E. (2022). *Sejarah Petrus, Para Penembak Misterius di Era Orde Baru*. INews Yogya. https://yogya.inews.id/berita/sejarah-petrus-para-penembak-misterius-di-era-orde-baru?utm_source=chatgpt.com
- Isnaeni, H. F. (2018, October). Tanggung Jawab Soeharto dalam Penembakan Misterius.

- Historia*. https://www.historia.id/article/tanggung-jawab-soeharto-dalam-penembakan-misterius?utm_source=chatgpt.com
- Maula, K., Patya, R. ruby pefi, & Astuti, T. (2025). PENEMBAKAN MISTERIUS DI INDONESIA PADA PERIODE 1982-1985 YANG DIAKUI NEGARA SEBAGAI PELANGGARAN HAM BERAT. *Studi Pendidikan Dan Sosial-Humaniora (Pengelolaan Baru)*, 2(2), 1-10.
- Rachmawati. (2023). *Cerita Keluarga Korban Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Bu Nuk Khawatir Menunggu Sang Suami Pulang*. Kompas.Com. https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/04/13/063000278/cerita-keluarga-korban-peristiwa-penembakan-misterius-1982-1985-bu-nuk?utm_source=chatgpt.com
- Subekti. (2023). *Indonesia: President's rare acknowledgement of past human rights abuses is "nothing without accountability."* Amnesty International. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-presidents-rare-acknowledgement-of-past-human-rights-abuses-is-nothing-without-accountability/01/2023/>
- Tonto. (2025, July). Kisah Penembakan Misterius. *Kilat.Com*. https://www.kilat.com/nasional/84415516882/kisah-penembakan-misterius?utm_source=chatgpt.com
- Wilson, I. (2015). *The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive capital, authority and street politics*. <https://doi.org/10.4324/9780203799192>